



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TITIK LESTARI**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **860054**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.152.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m<sup>2</sup>/170 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m<sup>2</sup>/90 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 1022 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 1.277.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 412.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2.4 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N12L2AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA D1B02N26L2AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 26.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 242.180.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	3.832.930.000
III. HUTANG	Rp.	205.945.701
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.626.984.299

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.